



PROVINSI SUMATERA SELATAN

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026

**PALEMBANG
2026**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk mempersiapkan masyarakat dengan memperkuat kelembagaan masyarakat agar mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Implementasi pemberdayaan itu sendiri sangat bervariasi dari waktu ke waktu. Pada masa lalu program pemberdayaan masyarakat dibuat di tingkat pusat (Top down) yang dilaksanakan oleh instansi Provinsi dan kabupaten. Masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut tidak diberikan pilihan dan kesempatan untuk memberi masukan. Hal ini dilakukan untuk mencapai efisiensi dalam pembangunan dan menganggap masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk menganalisa kondisi dan merumuskan persoalan serta kebutuhan-kebutuhannya. Dalam pandangan ini masyarakat ditempatkan pada posisi yang membutuhkan bantuan dari luar.

Program pemberdayaan masyarakat saat ini memposisikan masyarakat sebagai pelaku utama, sehingga masyarakat itu sendiri yang menentukan kebutuhan dan prioritas yang diinginkan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses untuk meningkatkan aset dan kemampuan masyarakat terutama masyarakat miskin dan tertinggal menuju keswadayaan dan kemandirian. Proses pemberdayaan bertumpu pada upaya penyadaran (*concientization*) peningkatan kapasitas (*capacity building*) *self organization*, akses kepada sumber daya serta pengembangan kemampuan advokasi yang diharapkan secara bertahap mampu melakukan perubahan yang mendasar dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Menurut Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tanggal 14 Desember 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas

dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Untuk mempercepat program pembangunan, pemulihan ekonomi dan landasan dasar pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan didasarkan pada sistem ekonomi kerakyatan. Di dalam prioritas ini tercakup penanggulangan kemiskinan (salah satu isu lintas bidang yang mesti didahulukan) yang terurai atas sejumlah upaya yaitu peningkatan dan ketertiban yang mendukung kegiatan pelaku usaha kecil, pengendalian pertumbuhan penduduk, pembangunan ekonomi yang menjangkau mayoritas penduduk miskin, peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk meningkatkan produktivitas dan martabat, pengembangan sistem jaminan sosial, peningkatan akses usaha kecil dan koperasi terhadap sumber pembiayaan serta pembangunan pertanian dan pedesaan terkait upaya pelestarian lingkungan (ekosistem).

Upaya pemberdayaan masyarakat mempunyai landasan yang sangat kokoh yaitu komitmen pada hak-hak asasi manusia sebagai landasan moral dan etik, baik pada tatanan internasional maupun nasional seperti termaktub dalam UUD 1945 (yang telah diamandemen) Bab X.A Pasal 28.a-28.j. Dalam Keppres Nomor : 124 tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan (beserta perubahan-perubahannya) dengan tegas dinyatakan dalam Konsiderans (d) sebagai berikut :

“Bahwa dalam rangka upaya penanggulangan kemiskinan, pendekatan yang perlu digunakan adalah Pemberdayaan Masyarakat yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pembangunan”. Ini berarti bahwa pemberdayaan harus dijadikan pilar penanggulangan kemiskinan.

1.2. Landasan Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105).
2. Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435).
4. Peraturan presiden Nomor 117 tahun 2025 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2026
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029
6. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 -2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) ini disusun dengan maksud untuk menginternalisasikan sistem perencanaan strategis kepada seluruh pegawai sehingga tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan dapat terlaksana secara efektif dan efisien dengan tujuan untuk :

1. Memacu atau meningkatkan semangat kerja pada setiap bidang untuk dapat bekerja dan mengelola tugas pokok dan fungsinya di satu pihak dan unsur penunjangnya di lain pihak sehingga mendapatkan suatu kinerja yang dapat diukur.
2. Mengarahkan seluruh staf pada pekerjaan-pekerjaan yang difokuskan pada pencapaian visi dan misi yang pada gilirannya akan dapat

mewujudkan kemandirian masyarakat dan penguatan pemerintahan desa menuju masyarakat sejahtera, cerdas yang berbudaya.

3. Mengkoordinasikan rencana strategis ini pada semua dinas atau instansi yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam pemberdayaan masyarakat dan desa.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut ;

Bagian I Pendahuluan ; memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bagian II ; Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; evaluasi pelaksanaan renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2026 sampai dengan triwulan II

Bagian III ; Rencana kerja dan pendanaan

Bagian IV ; Penutup.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Secara keseluruhan, pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 telah berjalan dengan sangat baik. Dari 1 (satu) indikator kinerja Utama yang ditargetkan, seluruhnya sampai dengan triwulan II tahun 2026, realisasi kinerja mencapai 11.62 % dari target 20,56%. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah tertuang dalam table di bawah ini :

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja D dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026 sampai dengan triwulan II
Provinsi Sumatera Selatan

Kode	Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Realisasi Target Capaian Kinerja TA 2026 per TW II	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi %		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target renstra
		URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DESA	PERSENTASE PEMENUHAN LAYANAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	100%		100%	100%	100%	100%	100%	
	1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%		100%	100%			100%	
	1.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen			2 dokumen	
	1.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	-	2 dokumen	2 dokumen			2 dokumen	

1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	-	2 dokumen	2 dokumen			2 dokumen	
1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen	-	2 dokumen	2 dokumen			2 dokumen	
1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	70%	100%	100%			100%	
1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 orang/bulan	60 orang/bulan	60 orang/bulan	60 orang/bulan			60 orang/bulan	
1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			1 dokumen	

1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan			1 laporan	
1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Jumlah Laporan Koordinasi Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	3 laporan	1 laporan	3 laporan	3 laporan			3 laporan	
1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%			100%	
1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang			4 orang	
1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	60%	100%	100%			100%	
1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	2 paket	4 paket	4 paket			4 paket	
1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 paket	2 paket	6 paket	6 paket			6 paket	
1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 paket	2 paket	6 paket	6 paket			6 paket	
1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	2 paket	6 paket	6 paket			6 paket	

1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			1 dokumen	
1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Konsumsi Rapat Kantor dan SKJ)	3 laporan	1 laporan	3 laporan	3 laporan			3 laporan	
1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Sesuai Kebutuhan)	3 laporan	1 laporan	3 laporan	3 laporan			3 laporan	
1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	-	100%	100%			100%	
1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 unit	-	15 unit	15 unit			15 unit	
1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	70%	100%	100%			100%	
1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1800 lembar	1800 lembar	1800 lembar	1800 lembar			1800 lembar	

1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan			4 laporan	
1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 laporan	2	3 laporan	3 laporan			3 laporan	
1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusam Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	70%	100%	100%			100%	
1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 unit	7	13 unit	13 unit			13 unit	
1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 unit	14	28 unit	28 unit			28 unit	
1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	7	15 unit	15 unit			15 unit	
1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit			1 unit	

02			PROGRAM PENATAAN DESA	JUMLAH DOKUMEN HASIL IDENTIFIKASI, INVENTARISASI DAN FASILITAS PENATAAN DAN	100%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	
	1.01		Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Jumlah dokumen hasil penatausahaan penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan dan masa jabatan kepala desa dan desa adat	100%	50%	100%	100%			100%	
	1.01	03	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa (Desa Persiapan)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			1 dokumen	
03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	JUMLAH DOKUMEN HASIL FASILITASI PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	100%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	
	1.01		Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa yang Memiliki Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil kerja sama antar desa yang memiliki kewenangan provinsi	100%	50%	100%	100%			100%	
	1.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	2 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen			2 dokumen	

04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH DOKUMEN HASIL FASILITASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	100%	70%	100%	100%	100%	100%	100%	
	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	100%	70%	100%	100%			100%	
	1.01	04	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen			1 dokumen	
	1.01	05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	dokumen	dokumen	dokumen	dokumen			dokumen	
	1.01	06	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	2 dokumen	-	2 dokumen	2 dokumen			2 dokumen	
	1.01	08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			1 dokumen	
	1.01	10	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur pemerintah desa yang dibina	orang	-	orang	orang			orang	

	1.01	9	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan profil desa dan kelurahan	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen			1 dokumen	
	1.01	12	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Jumlah dokumen hasil pembinaan percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan dan bantuan teknis	2 dokumen	-	2 dokumen	2 dokumen			2 dokumen	
	1.01	15	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen			2 dokumen	
	1.01	16	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			1 dokumen	
	1.01	20	Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa	Jumlah fasilitasi labsite desa/kelurahan (desa/kelurahan contoh)	desa	desa	desa	desa			desa	

	1.01	22	fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			1 dokumen	
05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	JUMLAH HASIL PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	100%	70%	100%	100%	100%	100%	100%	
	1.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat yang Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hasil lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah provinsi serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang sama berada di lintas daerah kabupaten/kota	100%	70%	100%	100%			100%	
	1.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	#Jumlah Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	3 lembaga	1 lembaga	3 lembaga	3 lembaga			3 lembaga	
	1.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	# Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			1 dokumen	
	1.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 laporan	-	2 laporan	2 laporan			2 laporan	
	1.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 laporan	-	1 laporan	1 laporan			1 laporan	

	1.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan			1 laporan	
--	------	----	---	--	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--	-----------	--

2.2. Penyajian Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah dilakukan melalui pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Indikator kinerja yang dianalisis disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat desa. Disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan yang menggambarkan perkembangan capaian kinerja perangkat daerah, yaitu sebagai berikut :

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMD

Provinsi Sumatera Selatan

No	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Catatan Analisis
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1.	Persentase Desa Mandiri	20.18%	20.56%	20.98%	21.54%	8.16%	11.62%	-	
2.	Persentase Desa Maju	36%	36%	36%	36%	40.42%	44.78%	-	
3.	Persentase Peningkatan status desa mandiri	15%	20%	25%	30%	-58.98	-	-	Hasil nya minus dikarenakan terdapat perubahan instrumen perhitungan dari Indeks desa Membangun menjadi Indes Desa. Realisasi Tahun 2026 Akan di update di awal tahun 2027.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) berpusat pada upaya penguatan kemandirian desa, peningkatan tata kelola pemerintahan, serta pengentasan kemiskinan perdesaan. Berikut adalah rincian isu-isu penting tersebut :

- Tata Kelola Pemerintahan Desa, Masih terbatasnya kapasitas, pengetahuan, dan keterampilan aparatur serta pengurus lembaga di desa dalam menjalankan administrasi dan keuangan yang akuntabel, sejumlah produk hukum atau peraturan di tingkat desa belum sepenuhnya terdokumentasi dan harmonis dengan aturan di atasnya.
- Kemandirian dan Pembangunan Ekonomi Desa, belum optimalnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai motor penggerak ekonomi lokal yang mandiri dan berdaya saing.
- Potensi Ekonomi Lokal, Produktivitas dan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal yang masih tradisional dan belum terintegrasi dengan pasar yang lebih luas.
- Keterbatasan Sumber Daya, Terbatasnya jumlah personel pendamping, sarana prasarana penunjang, serta alokasi anggaran operasional untuk pembinaan wilayah yang luas.

2.4. Review terhadap rancangan Perubahan RKPD Tahun 2026

Review terhadap Rancangan Awal RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) merupakan tahapan krusial untuk memastikan keselarasan dokumen perencanaan tahunan dengan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) serta program strategis nasional. Proses ini dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) atau Inspektorat guna menelaah kesesuaian target, indikator kinerja, hasil evaluasi tahun berjalan, serta kapasitas riil fiskal daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

Setiap sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Didalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif yang dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Dengan demikian, kegiatan adalah penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian misi dan visi organisasi, serta berdimensi waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Kegiatan adalah aspek operasional dari suatu rencana strategik yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Program, kegiatan dan Indikator kinerja kegiatan pada masing-masing program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan untuk Tahun 2026.

Berikut ini gambaran mengenai susunan Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan yang telah rumuskan pada rencana perubahan tahun 2026 beserta pendanaan indikatif dan target dari Indikator Kinerja pada tiap kegiatannya dalam bentuk Tabel Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan sebagai berikut:

Tabel 3.1
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGAPROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2026

Kode	Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	PAGU ANGGARAN				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD 2026	PERKADA 1 2026	APBD-P 2026
1	2	3	3.714285714	4.357142857		4	5	6
		URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
		URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DESA	PERSENTASE PEMENUHAN LAYANAN KINERJA PERANGKAT DAERAH		100%	13,836,528,820	13,339,408,874	11,201,409,342
	1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah		100%	362,000,000	352,680,054	352,680,054
	1.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor OPD	2 dokumen	285,000,000	285,000,000	275,000,000
	1.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kantor OPD	2 dokumen	1,000,000	1,000,000	16,000,000

1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kantor OPD	2 dokumen	1,000,000	1,000,000	16,000,000
1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kantor OPD	2 dokumen	75,000,000	65,680,054	45,680,054
1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah		100%	8,371,857,460	8,371,857,460	7,323,857,928
1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor OPD	60 orang/bulan	7,927,620,532	7,927,620,532	6,879,621,000
1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kantor OPD	1 dokumen	327,780,000	327,780,000	327,780,000

1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kantor OPD	1 laporan	63,016,928	63,016,928	63,016,928
1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Jumlah Laporan Koordinasi Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kantor OPD	3 laporan	53,440,000	53,440,000	53,440,000
1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah		100%	150,000,000	60,000,000	60,000,000
1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kantor OPD	4 orang	150,000,000	60,000,000	60,000,000
1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah		100%	1,843,236,643	1,062,436,643	1,562,436,643
1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kantor OPD	4 paket	200,000,000	80,000,000	80,000,000
1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kantor OPD	6 paket	30,000,000	30,000,000	30,000,000

	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kantor OPD	6 paket	300,000,000	150,000,000	150,000,000
	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kantor OPD	6 paket	250,000,000	100,000,000	100,000,000
	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kantor OPD	1 dokumen	17,000,000	7,000,000	7,000,000
	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Konsumsi Rapat Kantor dan SKJ)	Kantor OPD	3 laporan	500,000,000	120,000,000	120,000,000

	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Sesuai Kebutuhan)	Kantor OPD	3 laporan	546,236,643	575,436,643.00	1,075,436,643.00
	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah		100%	21,834,773	21,834,773	21,834,773
	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kantor OPD	15 unit	21,834,773	21,834,773	21,834,773
	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah		100%	1,324,599,944	1,314,599,944	1,314,599,944
	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor OPD	1800 lembar	27,000,000	17,000,000	17,000,000
	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kantor OPD	4 laporan	397,599,944	397,599,944	397,599,944

	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kantor OPD	3 laporan	900,000,000	900,000,000	900,000,000
	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusam Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah		100%	1,763,000,000	2,156,000,000	566,000,000
	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kantor OPD	13 unit	83,000,000	70,000,000	70,000,000
	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kantor OPD	28 unit	400,000,000	316,000,000	316,000,000
	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kantor OPD	15 unit	90,000,000	80,000,000	80,000,000

	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kantor OPD	1 unit	1,190,000,000	1,690,000,000	100,000,000
02			PROGRAM PENATAAN DESA	JUMLAH DOKUMEN HASIL IDENTIFIKASI, INVENTARISASI DAN FASILITAS PENATAAN DESA		100%	50,000,000	50,000,000	5,000,000
	1.01		Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Jumlah dokumen hasil penatausahaan penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan dan masa jabatan kepala desa dan desa adat		100%	50,000,000	50,000,000	5,000,000
	1.01	03	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa (Desa Persiapan)	Kab/Kota	1 dokumen	50,000,000	50,000,000	5,000,000
03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	JUMLAH DOKUMEN HASIL FASILITASI PENINGKATAN KERJA SAMA DESA		100%	600,000,000	531,000,000	631,000,000
	1.01		Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Desa yang Memiliki Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil kerja sama antar desa yang memiliki kewenangan provinsi		100%	600,000,000	531,000,000	631,000,000

	1.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	Provinsi Sumatera Selatan, kabkota	2 dokumen	600,000,000	531,000,000	631,000,000
04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH DOKUMEN HASIL FASILITASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH		100%	4,228,400,000	3,083,200,000	4,507,200,000
	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		100%	4,228,400,000	3,083,200,000	4,507,200,000
	1.01	04	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa	kab/kota	1 dokumen	650,000,000	450,000,000	750,000,000
	1.01	05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	kab/kota	dokumen	800,000	800,000	800,000
	1.01	06	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	kab/kota	2 dokumen	400,000,000	1,000,000	1,000,000

1.01	08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab/Kota	1 dokumen	1,000,000,000	1,070,800,000	937,800,000
1.01	10	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur pemerintah desa yang dibina	Kab/Kota	orang	1,100,000,000	818,000,000	1,384,000,000
1.01	9	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan profil desa dan kelurahan	17 kab/kota	1 dokumen	600,000,000	1,000,000	1,000,000
1.01	12	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Jumlah dokumen hasil pembinaan percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan dan bantuan teknis	17 kab/kota	2 dokumen	800,000	800,000	800,000

	1.01	15	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Kab/Kota	2 dokumen	424,200,000	458,200,000	804,200,000
	1.01	16	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab/Kota	1 dokumen	50,800,000	280,800,000	625,800,000
	1.01	20	Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa	Jumlah fasilitasi labsite desa/kelurahan (desa/kelurahan contoh)	17 kab/kota	desa	800,000	800,000	800,000
	1.01	22	fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	Kab/Kota	1 dokumen	1,000,000	1,000,000	1,000,000

05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	JUMLAH HASIL PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		100%	3,876,800,000	4,335,800,000	5,046,800,000
	1.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat yang Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hasil lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah provinsi serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang sama berada di lintas daerah kabupaten/kota		100%	3,876,800,000	4,335,800,000	5,046,800,000
	1.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	#Jumlah Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	17 kab/kota	3 lembaga	600,000,000	660,000,000	838,000,000
	1.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	# Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	kab/kota	1 dokumen	1,000,000	360,000,000	660,000,000
	1.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	kab/kota, luar provinsi	2 laporan	275,000,000	315,000,000	548,000,000

	1.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	17 kab/kota	1 laporan	800,000	800,000	800,000
	1.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	17 kab/kota	1 laporan	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000
JUMLAH							22,591,728,820	21,339,408,874.00	21,391,409,342.00

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja ini perlu dijabarkan secara cermat dengan memperhatikan perkembangan potensi sumber daya manusia dan potensi sumber daya alam yang ada, sehingga dapat menyesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Sumatera Selatan.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2026 diharapkan dapat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan khususnya di Provinsi Sumatera Selatan.

Palembang, Agustus 2026

Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Sumatera Selatan,



Drs. H. Sutoko., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196612141994031004

